

DIES NATALIS KE-50 FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



DILEMA MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA :

Memilih antara Tuntutan Global
atau Kearifan Lokal



1965-2015



DILEMA MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA:

MEMILIH ANTARA TUNTUTAN
GLOBAL ATAU KEARIFAN LOKAL

EDITOR ISI:

Dr. Nasiwan, M.Si.

Editor Bahasa

1. **Danu Eko Agustinova, M.Pd.**
2. **Eko Prasetyo Nugroho Saputro, S.Pd.**

FISTRANS Institute

Forum Ilmu Sosial Transformatif
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta

Penerbit
CV PRIMAPRINT
Yogyakarta

DILEMA MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA:

Memilih antara Tuntutan Global atau Kearifan Lokal

EDITOR ISI:

Dr. Nasiwan, M.Si.

Editor Bahasa

1. Danu Eko Agustinova, M.Pd.

2. Eko Prasetyo Nugroho Saputro, S.Pd.

Penerbit: CV PRIMAPRINT

ISBN 978-602-70107-8-9

© FISTRANS INSTITUTE

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Cetakan I, September 2015 M

DAFTAR ISI

BAB I ~ KONSEPSI UMUM TENTANG PENDIDIKAN

DR. TAAT WULANDARI

Epistemologi Kultural dan Relevansinya bagi Pendidikan: Menuju Manusia Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter ~ 2

BUDI MULYONO, M.PD

Berlaku Demokratis Sejak dalam Pikiran: mengembangkan Karakter Masyarakat yang Demokratis dari Pola Pikir Hingga Tingkah Laku ~ 11

GRENDI HENDRASTOMO, M.A.

Re-Imajinasi Karakter melalui Penegasan Identitas Indonesia ~ 21

NUR ENDAH JANUARTI, M.A.

Globalisasi sebagai Peluang dan Tantangan Pendidikan Karakter di Indonesia ~ 33

UTAMI DEWI, M.A.

Mewujudkan Kepemimpinan Transformatif dan Berkarakter Ke-Indonesiaan ~ 48

BAB II ~ PENDIDIKAN INDONESIA DI ERA GLOBAL

HALILI, M.A.

Membangun Keutamaan Generik: Mendidik Generasi Indonesia Masa Depan ~ 60

DR. DYAH KUMALASARI

Menguatkan Kembali Jiwa Kebinekaan dalam Pendidikan di Indonesia ~ 76

DYAH AYU ANGGRAHENI IKANINGTYAS, S.S., M.A.

Meneladani Perjuangan Ki Hadjar Dewantara Bersama Taman Siswa, Melawan Wilde Scholen Ordonnantie 1932 ~ 90

DR. SUNARSO

Pendidikan Humanis dalam Pandangan Paulo Freire dan Ki Hadjar ~ 104

DEWANTARA MARITA AHDIYANA, M.SI

Meretas Asa Kepemimpinan Birokrasi Pasca Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ~ 124

LENA SATLITA, M.SI

Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas ~ 140

SUYATO, M.PD

Globalisasi dan Pendidikan untuk Pembentukan Identitas Nasional ~ 153

DRS. HERU PRAMONO, S.U.

Etika Profesi Keguruan ~ 168

BAB III ~ REFLEKSI PENDIDIKAN KARAKTER

CHOLISIN, M.SI

Mengatasi Masalah Karakter Bangsa dengan Mengimplementasikan Pancasila sebagai Ideologi Negara ~ 180

DR. AMAN, M.PD.

Pendidikan Sejarah dan Karakter Bangsa: Sebuah Pertanggungjawaban ~ 193

PROF. DR. ABDUL GAFUR

Aspek Afektif dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Negara: Relevansi Nya dalam Pembentukan Karakter Manusia Indonesia ~ 208

DR. MARZUKI, M.A.G.

Manusia dan Problematikanya dalam Pembentukan Karakter Mulia Perspektif Islam ~ 226

MIFTAHUDDIN, M.PD

Krisis Karakter Masyarakat Indonesia dan Moral Islam sebagai Suatu Tawaran ~ 244

PROF. DR. HUSAIN HAIKAL

Berpijak di Pertiwi Demi Proklamasi? ~ 257

DANU EKO AGUSTINOVA, M.PD

Sekolah Islam Terpadu (SIT): Model Pendidikan Karakter Ideal di Indonesia ~ 273

SUGIHARYANTO, M.SI
Pengembangan Nilai Karakter pada Generasi Muda Indonesia~286

BAB IV ~ MENENGOK KEMBALI KEARIFAN LOKAL

DR. HASTUTI

*Kearifan Lokal sebagai Penjaga Lingkungan di Lereng Merapi
Daerah Istimewa Yogyakarta~296*

AGUSTINA TRI WIJAYANTI, M.PD

Revitalisasi Budaya Lokal Masyarakat Indonesia ~312

SUDRAJAT, M.PD

Karakter Manusia Jawa dalam Kajian Naskah Sastra~323

PRATIWI WAHYU WIDIARTI, M.SI

Psapidentitas Diri Remaja Sumenep Madura~337

ARIF ASHARI, M.SC

*Kearifan Masyarakat Jawa Pra Modern di Lembah Progo
dalam Pengenalan Bentanglahan untuk Lokasi Permukiman:
Tinjauan Studi Geoarkeologi~366*

RARAS GISTHA ROSARDI, M.PD

*Fenomena Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) pada Era
Globalisasi sebagai bagian dari Pembangunan Karakter Bangsa
(Character Building) : (Studi Kasus Analisis Kearifan Lokal pada
Masyarakat Kotagede, Yogyakarta)~379*

KRISIS KARAKTER MASYARAKAT INDONESIA DAN MORAL ISLAM SEBAGAI SUATU TAWARAN

MIFTAHUDDIN *

Pendahuluan

Kapan bangsa Indonesia segera dapat beranjak dari berbagai persoalan atau krisis?, adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Berbagai permasalahan tampaknya selalu mengiringi perjalanan bangsa Indonesia, misalnya, dari krisis kepemimpinan, sumber daya manusia yang lemah, permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kejahatan, korupsi, sampai belum adanya kesadaran akan perbedaan. Dapatlah dilihat, pada awal perjalanan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, masyarakat disibukkan dengan konflik karena adanya perbedaan pandangan politik maupun ideologi. Selanjutnya, pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno selaku presiden cenderung otoriter, menganggap orang lain lemah dan intinya ingin melanggengkan kekuasaan. Tidak jauh berbeda dengan masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, Soeharto tampil memimpin Indonesia dengan cara-cara diktator, kebal kritik, menggunakan cara-cara teror dan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan, dan semua itu untuk melestarikan kekuasaannya. Lebih dari itu, pada masa Orde Baru negara dirampok untuk kepentingan elite pemerintah dengan cara-cara korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Setelah memasuki era Reformasi dengan semangat perbaikan dalam segala bidang, berbagai masalah pun tidak kunjung terselesaikan. Bahkan, pada era ini tampak muncul pemain-pemain baru, menggantikan pemain lama yang sama-sama rusak mental dan karakternya dan bahkan melebihi. Pemain baru ini hanyalah berganti baju saja, akan tetapi dalamnya sama dengan yang lama. Banyak orang yang pada masa Orde Baru tampak kritis terhadap pemerintah untuk memperjuangkan keadilan, namun setelah kebagian memimpin dan memegang tampuk pemerintahan tidak banyak yang dapat mereka perbuat. Lebih dari itu, mereka dengan terang-terangan juga merampok negara melalui tindakan korupsi.

Adanya fenomena sebagaimana disebutkan di atas, maka

muncul pertanyaannya, apakah memang semacam itu karakter masyarakat Indonesia yang sebenarnya? Betulkah masyarakat Indonesia bermental pengemis, pencuri, dan pemalas? Masihkah ada harapan bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki kondisi ini?, dan jika masih ada, adakah paradigma yang bisa dijadikan tawaran dan sebaagai solusi? Untuk itu, tulisan ini mencoba menawarkan paradigma Islam sebagai salah satu solusi untuk mengatasi krisis bangsa ini.

Karakter Manusia Indonesia: Suatu Ralita

Krisis karakter masyarakat Indonesia, khususnya tindakan kaum elite yang menyengsarakan kaum lemah, dalam sejarah bangsa sebenarnya telah ada sejak lama. Pada masa kolonial, misalnya, Onghokham (2003: 81-82) menyebutkan bahwa para pejabat pemerintah melakukan penindasan yang merugikan masyarakat kecil akibat tuntutan kondisi. Diketahui, bahwa kebutuhan bupati jauh lebih besar daripada keperluan residen (Belanda) dengan keluarga inti (anak dan istri). Seorang bupati memiliki keluarga besar: famili dan anak pinak, apalagi bila punya lebih dari satu istri. Bupati sebagai bapak daerah, juga harus mengeluarkan biaya untuk anak buahnya. Untuk keperluan pesta, selamatan, dan memberi makan rumah tangga, dia memerlukan kira-kira 2.000 pikul beras setahun, sedangkan pada waktu bersamaan keluarga biasa orang Belanda atau Cina hanya 25 pikul. Oleh karena itu, wajar apabila muncul laporan ke pusat, bahwa banyak pemerasan kecil yang dilakukan kepada rakyat. Walaupun bagi kalangan pejabat Belanda, praktik ini tidak perlu ditindak, dikarenakan ini sudah menjadi adat. Para Residen Belanda mengerti hal itu, dan mereka memahami karena memang kebutuhan bupati yang begitu besar.

Demikian pula di tingkat bawah bupati, pemerasan oleh priyayi rendah berjalan tanpa pengawasan Belanda. Walaupun gaji priyayi bawahan sangat rendah, namun seorang wedana, camat, atau mantri dapat memelihara tiga sampai empat kuda bagus, hidup di rumah mewah, serta menghidangkan jamuan besar. Baru pada tahun 1870, dengan dihapusnya sistem Tanam Paksa dan *cultuurprocenten*, semua gaji direvisi, yaitu yang rendah agak dinaikkan sedikit, dan korupsi dikalangan priyayi rendah lebih banyak ditindak pemerintah Hindia Belanda. Namun, berbeda dengan priyayi rendah, korupsi para bupati jarang kena tindakan,

* Dosen Prodi Ilmu Sejarah FIS UNY

karena bupati sangat berpengaruh secara politis (Onghokham, 2003: 82).

Selanjutnya, memasuki masa pasca revolusi, menurut Koentjaraningrat (2000: 46-47), bahwa di antara mentalitas masyarakat Indonesia yang timbul adalah mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuannya secepat-cepatnya. Mental orang semacam ini adalah mereka yang tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan secara selangkah demi selangkah, yang dapat disebut "mentalitas menerbas. Misalnya, dalam masyarakat Indonesia tampak terlampaui banyak usahawan yang mau saja mencapai dan memamerkan taraf hidup yang mewah dalam waktu yang secepat-cepatnya, dengan cara-cara yang tidak lazim, atau dengan cara "menyikat keuntungan sebesar-besarnya mumpung ada kesempatan", tanpa mau mengunyah pahit getirnya masa permulaan berusaha. Mentalitas menerbas itu pada dasarnya juga dapat disamakan dengan "mentalitas mencari jalan paling gampang".

Sesudah zaman revolusi sifat-sifat seperti tak percaya diri kepada kemampuan diri sendiri, mengendorkan disiplin, dan berkurangnya rasa bertanggung jawab, makin menjadi buruk. Sementara itu, timbul pula sifat-sifat mentalitas lemah seperti, menghilangnya rasa kepekaan terhadap mutu, dan "mentalitas menerbas". Banyak yang harus dirobah kalau hendak mengatasi penyakit-penyakit sosial budaya yang parah seperti krisis otoritas, kemacetan administrasi, dan korupsi yang menyeluruh (Koentjaraningrat, 2000: 73-74).

Demikian pula, krisis karakter masih melanda masyarakat Indonesia ketika memasuki masa Reformasi dan bahkan bertambah parah. Cita-cita untuk menjadikan negara dan bangsa ini bebas dari korupsi masih merupakan impian yang belum jelas kapan akan terwujud, walaupun reformasi telah digulirkan sejak tahun 1998. Setiap hari masyarakat Indonesia disuguhi informasi, baik di media cetak maupun di media elektronik, berapa banyak kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah dan di berbagai lembaga pemerintahan. Semua memuat informasi korupsi pejabat tinggi, mantan menteri, Gubernur, mantan Gubernur, Bupati, Walikota mantan Bupati atau Walikota, mantan Dirjen, Jendral Aktif, Jendral purnawirawan, Kepala Dinas, Jaksa, bahkan Hakim juga terlibat. Jadi tiada hari tanpa berita korupsi, sidang kasus korupsi pun

hampir digelar setiap hari. Belum lagi kalau mendengar pernyataan Menteri Dalam Negeri bahwa "ada 155 pejabat -17 di antaranya adalah seorang Gubernur tersangkut kasus hukum", ini sungguh amat mengejutkan (Abdul Muis, 2010: 2).

Sekarang fenomena korupsi menjadi sangat memprihatinkan dan dilakukan hampir di semua sektor dan melibatkan semua kalangan sehingga korupsi saat ini sudah membentuk budaya baru dikalangan masyarakat. Perkembangannya pun cukup pesat, bahkan korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dari kalangan atas saja. Orang kalangan bawah sering melakukan korupsi kecil-kecilan yang terkadang mereka tidak menyadarinya. Dari mulai pengemis yang berpura-pura cacat, dari siswa yang sering mencontek, dari kalangan PNS yang sering terlambat, dari polisi yang sering memberikan jalan pintas melalui suap, dari mahasiswa yang terkadang memanipulasi data demi nilai, dan dari tindak kriminal lain yang berusaha mencari jalan pintas dengan mengambil hak orang lain dan cenderung menipu. Mencuri, mencopet, merampok, dan korupsi adalah kegiatan yang sama-sama memiliki tujuan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Sesuatu yang mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain, baik sekala pribadi, keluarga, masyarakat maupun rakyat dari sebuah negara. "Masih banyak istilah lokal yang menunjukkan kesamaan korup dalam kehidupan masyarakat". Hanya saja yang membedakan adalah korupsi dipakai khusus untuk penjahat berkemeja putih atau istilah lain *White Collar Crime*, sedangkan istilah *nyolong*, menipu, dan lainnya biasa digunakan untuk kalangan bawah atau biasa disebut kerah biru (*Blue Collar Crime*) (Reistya Nida D. W, 2011, 1-2).

Sebagaimana fenomena sosial yang terjadi pada akhir-akhir ini korupsi sudah terjadi di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan BUMN, seperti halnya: kasus korupsi perpajakan, kasus "Bank Century", kasus suap pada anggota DPR, "Markus" (makelar kasus), mafia pengadilan, dan lain-lain. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa aktivitas kelembagaan, semakin lama semakin terjebak kepada hal-hal yang pragmatis materialistik. Padahal, budaya kelembagaan adalah juga pendidikan hati (kualitatif spiritualitas). Budaya kelembagaan mestinya mampu membangun sikap dan sifat-sifat seperti jujur, tegas, hati-hati, percaya diri, penuh pertimbangan, berani, sopan, bersemangat, lembut, dan halus, sikap ramah, moderat dan bijaksana, rendah hati, adil, mengamalkan kebaikan, menabur kasih sayang, hidup sederhana, taat dan patuh, sabar

menjaga kedamaian, dapat mempercayai dan dipercaya (Reistya Nida D. W, 2011, 42).

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia pun dikejutkan dengan salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, pengusaha ternama di Banten. Dia adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Istri Wawan adalah Arini yang menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Wawan ditangkap penyidik KPK pada 3 Oktober 2013. Ia digelandang ke ruang penyidik KPK hanya berselang beberapa jam dari tertangkap tangannya Ketua MK (Mahkamah Konstitusi), Akil Mochtar dalam kasus dugaan suap dalam sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Wawan disangkakan terlibat penyuaipan MK untuk kasus perkara Pilkada Lebak, Banten, yang sedang ditangani MK. Sementara itu, aset kendaraan Wawan yang sudah disita KPK sebanyak 17 mobil dan sebuah sepeda motor Harley Davidson. Sebagian dari mobil yang disita tersebut masuk dalam kategori sport dan super mewah dengan harga ditaksir mencapai miliaran rupiah (*Tribun Jogja*, 29 Januari 2014: 12). Belum lagi pencucian uang yang dilakukan oleh wawan dengan cara memberi hadiah mobil mewah ke sejumlah artis. Oleh karena itu, Susah untuk mengatakan gaya hidup model apa yang dilakukan oleh Wawan, mungkin saja konsumtif plus kebejatan moral.

Memang gaya hidup konsumtif, ingin cepat kaya dengan jalan pintas menabrak kiri kanan, menepisnya kesetiakawanan sosial dan sebagainya merupakan gejala yang hampir dianggap lumrah-lumrah saja oleh sebagian besar masyarakat kita yang justru status ekonominya jauh lebih baik daripada golongan masyarakat yang lain (Amin Abdullah, 2004: 168). Kasus Wawan di atas tampaknya cerminan masyarakat Indonesia. Jika diperhatikan masih banyak kasus lain, dengan didukung gaya hidup konsumtif, perilaku masyarakat bangsa ini yang senang mengkolleksi barang mewah, baik spatu, perhiasan, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Mereka tidak puas hanya dengan memiliki satu barang saja untuk sekedar memenuhi kebutuhan, bahkan sudah menjadi gejala umum ketika mereka mempunyai sedikit kelebihan harta akan mengiringi pula bertambah istri, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Jelas dengan pola semacam itu, maka akan bertambah pula biaya hidup yang akhirnya mendorong perilaku maling, menjarah, atau korupsi.

Dapatlah dibenarkan jika penyebab korupsi adalah gaji yang

sangat rendah sebagaimana yang terjadi pada masa kolonial. Karena menerima gaji yang sangat rendah, orang-orang yang bekerja pada kompeni Belanda sangat mudah tergoda untuk menerima imbalan tambahan dari organisasi-organisasi pribumi yang lemah. Dengan beralihnya kekuasaan dari penguasa kolonial ke tangan pemerintah Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap penggunaan kekayaan negara secara benar cenderung meningkat (Revrison Baswir, 2002: 26-27). Walaupun demikian, tetap saja banyak terjadi penyelewengan kekuasaan dengan mengambil kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Bahkan korupsi banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah mempunyai gaji besar dan penghasilan yang sebenarnya lebih dari cukup.

Gejala yang dapat disaksikan pula, bahwa praktek korupsi di masyarakat telah merambah ke-segala sendi kehidupan. Kita terkadang sulit membedakan apakah ini praktek korupsi atau tidak. Hal ini disebabkan adanya suatu kondisi yang menganggap suatu praktek korupsi yang sudah biasa dan tidak dianggap itu sebagai korupsi lagi. Masyarakat memandang seseorang yang dianggap sukses apabila ia mampu mengumpulkan banyak harta berupa rumah yang bagus dan mobil mewah, meskipun dari sisi kedudukan dan jabatannya sangat sulit kita menerima bagaimana caranya ia mampu mengumpulkan harta sebanyak itu. Namun masyarakat di lingkungannya tentu saja tidak melihat hal itu. Masyarakat cenderung melihat hasil yang telah dicapai dalam bentuk materi tanpa memperhatikan bagaimana caranya seseorang itu mendapatkannya (Sparta, 2011: 40).

Di tambah lagi, pelaku korupsi cenderung melakukan perbuatan terpuji di tengah masyarakat melalui sifat kedermawanannya. Pelaku sering memberikan sumbangan sosial ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, membantu pembangunan Mesjid, bahkan membangun Mesjid secara utuh di tempat kelahirannya. Pelaku korupsi juga suka membantu masyarakat *dhuafa*. Meskipun demikian tidak semua pelaku korupsi bersikap dermawan. Tidak sedikit dari mereka memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan agama dan budaya setempat. Bagi pelaku korupsi yang memiliki sikap dermawan sering status sosialnya ditempatkan oleh masyarakat dalam strata yang tinggi. Ada kekaguman masyarakat disitu terhadap pelaku korupsi. Namun pelaku korupsi yang memiliki sikap kurang dermawanpun, tetap juga ditempatkan oleh masyarakat sebagai orang yang sukses secara materi, karena

dianggap sukses mengumpulkan harta kebendaan dan kedudukan. Kedua tipe perilaku dari pelaku korupsi menimbulkan kekaguman bagi masyarakat (Sparta, 2011: 40).

Sudah menjadi gejala umum pula bahwa di lingkungan keluarga, pelaku korupsi dianggap sebagai orang yang hebat. Pelaku juga menjadi kekaguman dan teladan bagi anak dan istrinya (bila pelakunya lelaki, namun kadangkalanya pelaku korupsi juga dari golongan perempuan). Istri pelaku korupsi menjadi salah satu pendorong suami untuk melakukan tindakan korupsi. Istri merasa bangga bila suaminya dapat mengumpulkan harta sebanyak mungkin meskipun ia mengetahui pendapatan resmi suaminya tidak mencukupi. Namun sang istri sering menutup mata melihat kenyataan ini, yang penting adalah ia dapat menikmati harta yang berlimpah dari suaminya. Ia tidak mau tahu dari mana asalnya. Banyak juga istri-istri lain yang tergoda melihat teman-teman sesama istri yang mendapatkan kesenangan duniawi dari suaminya sementara ia sendiri tidak mendapatkan itu semua. Banyak diantara para istri tersebut membandingkan suami lain dengan pangkat dan jabatan yang lebih rendah namun memiliki harta dan fasilitas di rumah yang lebih melimpah. Sang istri ini cenderung membuat suaminya melakukan segala cara untuk mendapatkan harta yang banyak demi kesenangan istri tercinta (Sparta, 2011: 20).

Moral Islam sebagai Rujukan Paradigma

Memang betul, bahwa telah menjadi naluri manusia kecintaan kepada lawan seksnya, anak-anak, serta harta yang banyak berupa emas, perak, kuda piaraan, binatang ternak, sawah, dan ladang (QS Ali 'Imran [3]: 14). Akan tetapi, perlu diingat "harta yang banyak" oleh Al-Quran disebut "khair" (QS Al-Baqarah [2]: 180), yang arti harfiahnya adalah "kebaikan". Dengan demikian, bukan saja berarti bahwa harta kekayaan adalah sesuatu yang dinilai baik, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa perolehan dan penggunaannya harus pula dengan baik. Tanpa memperhatikan hal-hal tersebut, manusia akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Karena daya tarik uang atau harta seringkali menyilaukan mata dan menggiurkan hati, maka berulang-ulang Al-Quran dan hadits, memperingatkan agar manusia tidak tergiur oleh gemerlapan uang, atau diperbudak olehnya sehingga menjadikan seseorang lupa akan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi (M. Quraish Shihab, 2007: 405).

Jadi, jelas bahwa Al-Quran menuntut manusia supaya mempunyai integritas moral. Sebagai pemimpin di muka bumi, manusia dituntut untuk membawa kebaikan agar kerusakan tidak melanda. Manusia juga dilarang untuk berbuat angkuh dan sombong di muka bumi.

Sementara itu, pengertian karakter sendiri sebenarnya berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi 'positif', bukan suatu yang netral. Oleh karena itu, 'orang berkarakter' adalah orang punya kualitas moral (tertentu) yang positif. Karakter merupakan "keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang mendefinisikan seorang individu ke dalam seluruhnya tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. Karakter merupakan ciri dasar melalui mana pribadi itu terarah ke depan dalam membentuk dirinya secara penuh sebagai manusia apapun pengalaman psikologi yang dimilikinya. Dalam hal ini, pengembangan karakter merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus, karakter bukan kenyataan melainkan keutuhan perilaku. Karakter bukanlah hasil atau produk melainkan usaha hidup. Usaha ini akan semakin efektif, ketika manusia melakukan apa yang menjadi kemampuan yang dimiliki oleh individu (Siti Irene Astuti D., 2010: 45-47).

Dalam Islam, Umar bin Khatab sebenarnya telah mengajarkan kepada siapa saja yang menjadi pemimpin agar berkarakter. Misalnya, walaupun dia adalah seorang pejabat (*Amirul Mu'minin*), akan tetapi hidupnya seperti orang biasa, dan setiap orang bebas menanyakan tindakan-tidaknya. Suatu ketika beliau berkata: "Aku tidak berkuasa apa pun terhadap *Baitul Mal* (harta milik umum) selain sebagai petugas penjaga milik yatim piatu. Jika aku kaya, aku mengambil uang sedikit sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari. Saudara-saudaraku sekalian! Aku abdi kalian, kalian harus mengawasi dan menanyakan segala tindakan. Salah satu hal yang harus diingat, uang rakyat tidak boleh dihambur-hamburkan. Aku harus bekerja di atas prinsip kesejahteraan dan kemakmuran rakyat" (Jamil Ahmad, 2000: 30).

Umar bin Khatab sebagai khalifah yang agung, hidup dengan cara yang sangat sederhana. Tingkat kehidupannya tidak lebih tinggi dari kehidupan orang biasa. Suatu ketika Gubernur Kuffah mengunjungi sewaktu Umar sedang makan. Sang gubernur menyaksikan makanannya terdiri dari roti *gerst* dan minyak zaitun, dan berkata, wahai *Amirul Mu'minin*, padahal terdapat cukup

gandum di kerajaan Anda, mengapa Anda tidak makan roti dari gandum". Dengan agak tersinggung dan nada murung, Umar balik bertanya, "apakah Anda pikir setiap orang di kerajaannku yang begitu luas bisa mendapatkan gandum?", "tidak", jawab Gubernur. "Lalu, bagaimana aku dapat makan roti dari gandum?, padahal tidak semua rakyatku dengan mudah dapat mendapatkannya", tambah Umar (Jamil Ahmad, 2000: 38).

Tampaknya tauladan yang diberikan Umar bin Khatib akan baik jika dilakukan oleh para pejabat bangsa ini, dan jika bisa meniru tentu saja Indonesia akan menjadi negeri yang makmur, *baladun toyibatun warabbun gafur*. Amin Abdullah (2004: 173) mengemukakan, bahwa praxis atau contoh perilaku dan tindakan nyata adalah penting dalam usaha membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara sistematis, komprehensif, dan integralistik lewat jalur moral dan etika. Keteladanan (*uswatun hasanah*) adalah sangat berarti dalam memperkokoh ketahanan dan mental suatu bangsa. Mengingat masyarakat Indonesia, demikian juga masyarakat pada umumnya, masih cenderung untuk berbudaya elitis, artinya golongan elit masyarakat selalu dijadikan panutan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah, para dai dan mubaligh, para penatar akan bertindak sekaligus sebagai tokoh panutan dalam masyarakat. Contoh perilaku mereka dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat selalu menjadi sorotan masyarakat.

Masyarakat bangsa ini perlu ingat bahwa konon Indonesia termasuk beberapa negara yang paling tidak adil di muka bumi. Negara Indonesia telah berkembang menjadi negara yang sangat timpang, secara diametral berlawanan dengan cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jika hal itu benar, maka perlu menjadi perhatian karena bangsa yang melawan prinsipnya sendiri tidak akan lama bertahan. Diketahui bahwa keadilan dan keseimbangan adalah hukum jagad raya, dan manusia dipesan jangan sampai melanggar keadilan dan keseimbangan, biarpun dalam hal yang sekecil-kecilnya. Sebab, melanggar keadilan dan keseimbangan adalah tindakan melawan hukum kosmos, sehingga bencana yang diakibatkan pun akan berdimensi kosmis, bersifat menyeluruh. Negeri yang adil dan berkeseimbangan akan tegak berdiri, dan negeri yang tidak adil dan tidak berkeseimbangan

akan runtuh, lepas dari soal siapa dan apa agama penduduknya (Nurcholish Madjid, 2004: 106-107).

Untuk itu, tampaknya semua kalangan setuju jika korupsi ditempatkan sebagai kejahatan utama dan penyebab vital dari keruntuhan kejayaan bangsa. Korupsi adalah representatif dari tindakan yang tidak adil dan *mendhalimi* banyak orang. Tampaknya, manusia Indonesia adalah manusia yang mempunyai kecerdasan membuat aturan akan tetapi kemudian diingkari, menipu diri sendiri, manipulasi jabatan, berteater (berpura-pura tak berdosa), atau mengeruk keuntungan dari hak orang lain tanpa rasa bersalah sama sekali (Radar Panca Dahana, 2007: 252-253). Bukankan dalam sejarah bangsa Indonesia sebenarnya sudah diperingatkan, bahwa VOC yang pada awalnya jaya dinyatakan bangkrut, antara lain oleh korupsi sehingga harus runtuh dan dibubarkan pada tahun 1799 (Onghokham, 2003: 84-85).

Keserakahan manusialah, sebagai sifatnya yang tidak pernah puas, mendorong manusia untuk melakukan praktek korupsi yang membabi buta. Gaji bukanlah ukuran seseorang untuk melakukan korupsi. Gaji yang tinggi tidak menjamin manusia untuk tidak melakukan korupsi. Sifat keserakahan, kerakusan, dan tindakan yang tidak berdasarkan pada hati yang terdalam (*nurani*) telah membuat manusia tidak akan pernah puas. Apabila manusia jauh dari alam pikiran kesadaran yang hakiki sebagai manusia hamba Allah yang harus bertindak positif, maka hasrat untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya tentu akan bertambah. Ukuran moralitas dalam menjalani hidup bagi manusia tidak dianggap begitu penting lagi. Menjalani hidup sesuai dengan konsep moralitas bukanlah sesuatu yang mudah bagi manusia yang ingin kesenangan duniawi (Sparta, 2011: 39).

Dalam perspektif moral, bahwa korupsi adalah sebagai salah satu bentuk pembunuhan karakter bangsa. Misalnya, praktek korupsi di Indonesia pada masa Orde Baru telah menjadi pemicu berkembang dan berbuahnya praktek korupsi pada era Reformasi hingga terus meningkat sampai sekarang. Korupsi adalah salah satu bentuk krisis karakter yang dampaknya sangat buruk bagi bangsa Indonesia. Korupsi menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi bangsa ini, dan pada gilirannya menjadi sumber dari berkembangnya kemiskinan di Indonesia. Korupsi terjadi karena orang-orang kehilangan beberapa karakter baik, terutama sekali

kejujuran, pengendalian diri (*self regulation*), dan tanggung jawab sosial (Siti Irene Astuti D., 2010: 41-42).

Di sisi lain, negeri Saba' dapat juga dijadikan sebagai sebuah negeri pelajaran. Diketahui Negeri Saba adalah negeri yang makmur yang kemudian berubah menjadi miskin karena dosa-dosa penduduknya. Awalnya Saba' adalah subur dipenuhi dengan kebun-kebun tanaman yang dialiri dari bendungan Ma'arib, namun penduduknya berpaling dari peringatan Rasul. Bahkan, mereka menggunakan kemakmuran untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Akhirnya, Allah merusakkan bendungan Ma'arib, air bah dahsyat melanda kota-kota mereka, dan kebun-kebun subur berubah menjadi kebun-kebun gersang. Al-Qur'an menyebut berbuat dosa itu dengan "berbuat zalim terhadap diri sendiri". Bila orang berbuat dosa, maka ia menganiaya dirinya sendiri. Bila masyarakat membiarkan perbuatan dosa, maka masyarakat itu menghancurkan dirinya sendiri. Allah menghukum bukan saja dosa individual, tetapi juga dosa kolektif (Jalaluddin Rakhmat, 2003: 257-258).

Demikian pula bagi orang yang korupsi pada dasarnya dia telah menganiaya diri sendiri. Di sisi Tuhan, orang tersebut adalah hina dikarenakan mereka tidak pernah bersyukur dan tidak pernah cukup dengan apa yang telah diberikan Tuhan. Mereka sebenarnya adalah golongan orang-orang yang miskin. Menurut Komaruddin Hidayat (2010: 123), orang yang memiliki deposito miliaran, tetapi nyatanya masih mau korupsi, sesungguhnya mereka itu tergolong orang yang miskin dan pantas untuk dikasihani. Ketika orang sibuk mengumpulkan harta, bahkan dengan cara tidak halal, lalu hartanya hanya dipeluk dan dibanggakan, tetapi tidak "ditaklukkan" untuk sarana amal saleh, perasaan yang menganggap dirinya kaya adalah perasaan semu.

Perlu juga diingat, bahwa perbuatankorupsi iniakarnya adalah karena kecintaan manusia terhadap dunia yang begitu tinggi. Kesenangan terhadap *duniawiyah* memang terasa menyenangkan dan saat ini menjadi standar hidup yang harus dikejar oleh manusia, tetapi kalau dipikirkan dengan jernih ternyata kesenangan itu hanya sesaat saja (<http://politik.kompasiana.com/2011/11/11/>). Al-Qur'an menyebut pengaruh *duniawiyah* ini sebagai kesenangan yang menipu.

Ketahuiilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan

bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan, di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu (Surat Al-Hadid: 20).

Penutup

Jika melihat kondisi Indonesia sebagaimana dipaparkan, maka tampak krisis karakter tengah melanda masyarakat Indonesia. Nilai-nilai agama dan Pancasila sudah jauh ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, terutama dari kalangan para pemegang amanah rakyat. Untuk itu, "jangan putus asa" adalah pegangan yang tepat untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang tengah dilanda krisis ini. Pada dasarnya, harus ada manusia-manusia Indonesia walaupun mungkin "dianggap aneh" untuk selalu menyuarakan, mengajarkan, dan memberi tauladan akan kebaikan, kebenaran, ketulusan, dan kejujuran. Dapat diyakini, seandainya tidak ada manusia-manusia yang menjadi pahlawan kebenaran, maka tinggal tunggu saatnya kehancuran Indonesia.

Sebagai rakyat Indonesia, terkadang memang susah memilih pemimpin atau wakil rakyat yang bersungguh-sungguh untuk mengabdikan, amanah, cerdas, dan penyampaiannya dapat mudah dipahami. Memilih pemimpin yang benar-benar sempurna memang sulit didapatkan, apalagi jika melihat sistem yang berjalan di Indonesia yang belum mimihak kepada calon pemimpin dengan kriteria sebagaimana disebutkan. Kultur dan sistem yang berjalan adalah bahwa orang-orang yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai pemimpin haruslah dari mereka yang punya banyak uang atau para pembesar partai-partai tertentu yang hampir sedikit sekali memiliki integrasi moral. Demikian pula, rakyat sebagai pemilih dan yang menentukan pemimpin terkadang juga kurang cerdas, karena hanya mengejar kesenangan sesaat dengan mendapatkan iming-iming uang yang tidak terlalu besar jumlahnya dari para calon pemimpin atau anggota DPR. Selanjutnya, kriteria pemimpin yang seperti apa yang seharusnya dipilih?, tampaknya jawaban yang tepat adalah, "pilihlah pemimpin yang terbaik dari yang ada."

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, "Korupsi Di Indonesia Dan Sejarahhnya", *Jurnal Madani* Edisi 1/Mei 2010.
- Amin Abdullah, *Filsafat Kalam di Era Posmodernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi-Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 2003).
- Jamil Ahmad, *Serutus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2000).
- Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama: Menjadi Hidup Lebih Ramah dan Santun*, (Bandung: Hikmah, 2010).
- "Mobil Wawan Pecahkan Rekor", *Tribun Jogja*, 29 Januari 2014.
- Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia, 2004).
- Ong Hokham, *Wahyu yang Hilang Negeri yang Hilang*, (Jakarta: TEMPO, 2003).
- "Perilaku Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Islam", <http://politik.kompasiana.com/2011/11/11/perilaku-korupsi-di-indonesia-dalam-perspektif-islam-411661.html>.
- Radar Panca Dahana, *Inilah Kita: Mozaik Manusia Indonesia*, (Yogyakarta: Resist Book, 2007).
- Reisthya Nida D.W, "Korupsi + Budaya = Indonesia", *Dialektika* Edisi 08 Tahun 2011.
- Revrison Baswir, "Dinamika Korupsi Di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural", *Jurnal Universitas Paramadina* Vol.2 No. 1, September 2002.
- Sparta, "Praktek Korupsi di Indonesia Dari Sisi Filsafat Manusia", *MAJALAH AKUNTAN INDONESIA*, Edisi 29/Tahun V/2011.
- Quraish Shihab, M., *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 405.
- Siti Irene Astuti D., "Pendekatan Holistik Dan Kontekstual Dalam Mengatasi Krisis Karakter Di Indonesia", *Cakrawala Pendidikan*, Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY.